

Dialog Antaragama dan Kerja Kemanusiaan

Otto Gusti, SVD

(Dosen Filsafat di STFK Ledalero)

(Pos Kupang, 24 Oktober 2013)

Pada tanggal 25-29 Oktober 2013, Komisi JPIC SVD Ruteng dengan koordinatornya P. Simon Suban Tukan, SVD akan menyelenggarakan kegiatan temu pemuda lintas agama. Menurut rencana pertemuan ini akan dihadiri oleh 300 pemuda lintas agama se-Manggarai Raya.

Salah satu tema yang akan didiskusikan dalam acara temu tersebut adalah membangun dialog antaragama berbasis budaya guna menyelamatkan lingkungan hidup dari serbuan kapitalisme dan korporasi-korporasi transnasional.

Di tengah maraknya ketegangan dan konflik antaragama pada tataran ritual simbolik di Indonesia, perlu dicari usaha-usaha konkrit kemanusiaan yang dapat menjembatani kesenjangan antaragama. Pada tingkat nasional toleransi antara umat beragama sedang dicerai oleh keberatan atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Pasca pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengevaluasi kebijakan penempatan Susan, kini Forum Umat Islam (FUI) menyatakan akan memberikan dukungan kepada warga Lenteng Agung untuk membantu melengserkan lurah Lenteng Agung. FUI bahkan mengancam akan menurunkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota. Muhammad Al *Khaththath* dari FUI berpendapat bahwa penolakan terjadi karena selama ini Lenteng Agung dipimpin oleh muslim, sementara itu lurah Susan adalah seorang non muslim dan juga perempuan.

Kekerasan bukan saja terjadi dalam relasi antarumat beragama, namun sering mendapat legitimasi dari negara lewat produk undang-undang yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. UU Perkawinan, SKB Ahmadiyah, Undang-Undang Kerukunan Beragama dan pelbagai perda syariat atau injil di daerah-daerah merupakan contoh kebijakan diskriminatif yang diproduksi oleh negara. Negara bukan saja gagal menjalankan kewajiban etisnya yakni melindungi hak-hak asasi warganya termasuk hak kebebasan untuk berkeyakinan, melainkan juga secara sistematis menciptakan regulasi-regulasi yang membonsai kebebasan asasi warga tersebut.

Dominasi mayoritas atas minoritas adalah fenomena umum di Indonesia. Relasi timpang ini tidak hanya dijumpai di kalangan Islam. Di daerah-daerah di mana Gereja Katolik tampil sebagai mayoritas, aroma intoleransi juga dapat diendus dengan sangat gampang. Di Maumere misalnya gereja minoritas seperti GBI Rock hingga kini kesulitan mendapat pengakuan dari negara untuk mendirikan rumah ibadah yang layak. Alasannya, gereja-gereja tersebut dipandang mengganggu stabilitas kelompok mayoritas. Rupanya intoleransi merupakan patologi sosial yang melekat dalam diri setiap kelompok mayoritas.

Dalam relasi mayoritas minoritas label “ajaran sesat” juga nyaring terdengar. Pandangan atau tafsiran ajaran yang melenceng dari *mainstream* begitu gampang dinilai sesat atau bahkan jahat. Kerap kali penilaian “sesat” tersebut tidak cuma berhenti sampai pada tataran ideologis, melainkan berubah menjadi aksi-aksi kekerasan atau pemusnahan kelompok-kelompok lain

hanya karena keberlainannya. Dalam kondisi seperti ini negara sering tidak hadir atau jika hadir, ia justru memperkokoh rezim kebenaran teologis yang ikut memberi label ajaran sesat.

Persoalan-persoala ini harus menjadi alasan untuk terus mengembangkan dan mendorong usaha-usaha dialog antaragama demi menciptakan Indonesia sebagai rumah bersama yang damai, adil dan setara. Dialog antaragama harus diimbangi dengan kerja-kerja konkrit di bidang kemanusiaan lintas agama yang menunjang kultur kehidupan. Untuk konteks Nusa Tenggara Timur (NTT) bahaya kerusakan lingkungan hidup oleh korporasi-korporasi pertambangan, korupsi, kemiskinan dan kebodohan merupakan tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh agama-agama dan juga masyarakat adat.

Dialog antaragama lebih mudah dijalankan jika bertolak dari kerja-kerja kemanusiaan lintas agama tersebut. Namun untuk itu dibutuhkan juga keyakinan ideologis atau etis yang mempertemukan agama-agama. Fham hak-hak asasi manusia misalnya merupakan salah satu konsep moral universal yang melampaui sekat-sekat antaragama dan harus diterima oleh agama-agama yang memancarkan wajah kemanusiaan. Di samping itu masih ada usaha-usaha lain yang coba merumuskan nilai etis lintas agama. Salah satunya ialah apa yang dikenal dengan politik empati atau *compassio*.

Penderitaan korban adalah *locus* perjumpaan dan dialog antara agama dan ideologi yang berbeda. Sesungguhnya pada tempat pertama bukan studi perbandingan agama-agama yang mempertemukan agama-agama, tapi ikhtiar dan usaha bersama untuk mencari dan mengatasi akar segala penderitaan dan persoalan kekerasan. Pertanyaan para penderita dapat menjadi basis koalisi agama-agama demi menyelamatkan dan mendukung “*Compassio*” sosial dan politik di dunia dewasa ini. *Compassio* lebih dari sekedar empati. Ia adalah kemampuan untuk mengambil bagian dalam penderitaan sesama, terutama sesama yang asing dan diperlakukan secara tidak adil.

Ketika letusan Gunung Rokatenda mengguncang Palue, bantuan berdatangan bukan saja dari orang-orang Katolik, tapi juga dari kelompok Muslim seperti misalnya lewat lembaga kemanusiaan Muhammadiyah, *Dompot Duafa*. Sebuah bukti bahwa otoritas etis wajah korban melampaui sekat-sekat ritual ideologi, agama dan budaya.

Di tengah pusaran arus globalisasi yang ditandai dengan perjumpaan dan juga perbenturan antarbudaya dan agama, nilai-nilai moral universal dibutuhkan sebagai panduan agar budaya-budaya lokal dan agama-agama tidak terperangkap ke dalam bahaya primordialisme dan fundamentalisme. Nilai-nilai kemanusiaan universal dapat membebaskan nilai-nilai budaya lokal dan agama-agama dari unsur-unsur kekerasan dan penindasan seperti misalnya bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan yang terkandung dalam praktik budaya *belis*.

Akan tetapi manusia tidak pernah lahir sebagai manusia universal. Ia selalu lahir dalam keluarga tertentu yang menganut agama dan menjadi anggota dari suku atau budaya tertentu pula. Karena itu nilai-nilai budaya lokal dan agama di tengah era globalisasi harus menjadi rumah tempat berteduh dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal tersebut. Nilai-nilai kemanusiaan universal harus dijangkarkan dalam kebajikan-kebajikan lokal agar dapat dihayati dan menjadi sumber motivasi dalam bertindak.

Di tengah pusaran arus globalisasi umat manusia akan selalu hidup dalam ketegangan antara moralitas dan adat istiadat (*Sittlichkeit*), universalitas dan partikularitas, tradisionalitas dan post-tradisionalitas. Manusia senantiasa membutuhkan dua kutub ini dalam hidupnya, yang abstrak-universal dan konkret-personal. Godwin menggambarkan ketegangan ini dengan sebuah contoh. Godwin mengajukan pertanyaan, siapa yang harus diselamatkannya dari sebuah rumah yang

sedang terbakar: ayahnya sendiri atau Fénelon, seorang sastrawan termasyhur. Godwin memutuskan untuk menyelamatkan Fénelon karena Fénelon dipandanginya lebih berarti bagi kebahagiaan umat manusia. Itulah sikap etis berbasis universalisme egalitarian yang dikawinkan dengan utilitarisme. Cara pandang dunia yang dihuni oleh manusia-manusia, tetapi tidak mengenal ayah dan anak lagi. Albert Camus telah mengambil posisi ekstrem lain ketika dalam sebuah diskusi pada saat Perang Algeria mengatakan: “Saya percaya pada keadilan. Tetapi sebelum membela keadilan, saya akan membela ibuku.”

Memang selalu tidak mudah menjaga keseimbangan antara asal-usul dan emansipasi, antara solidaritas komunal sektarian dan kemanusiaan universal. Manusia kadang melihat dan memahami dunia ibarat sebuah hotel atau tempat berlibur. *Locus* geografis, cara hidup dan budaya dapat ditukar setiap saat. Orang dapat hidup di mana saja. Namun sesungguhnya, hotel bukan rumah (*home*), villa yang disewakan pada saat liburan tak dapat memberikan rasa *at home*. Hidup di pembuangan tidak sama dengan hidup di tanah air sendiri. Barangsiapa seperti Odysseus selama bertahun-tahun bepergian jauh, ingin satu ketika kembali ke rumahnya.
